**IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT (GAPURA)
SA-IJAAN DI DESA SUNGAI KUPANG JAYA
KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU
KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Harli

Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses implementasi program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan unsure-unsur masyarakat desa Sungai Kupang jaya sebagai subjek dan objek dari penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara, data skunder dari dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan serta data dukung dikumpulkan melalui kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang sangat mempengaruhi implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan adalah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya.

Kata kunci : Implementasi, Program Gapura

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menerapkan prinsip otonomi daerah dengan penekanan pada pemerataan dan keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta penghargaan terhadap potensi dan keanekaragaman lokal, maka sudah seharusnya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan perubahan yang mendasar. Pendekatan yang bersifat *bottom-to-top* haruslah menggantikan model pendekatan *top-to-down* yang selama ini diterapkan atau adanya perubahan pendekatan dari paradigma *state centered* menjadi *people centered*. Untuk menopang pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan perlu usaha yang terencana baik dalam upaya pembangunan sarana-sarana pendukung, sarana perhubungan, produksi, sarana pemasaran dan prasarana lainnya untuk

peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan siklus yang terus menerus., dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada diharapkan masyarakat dapat diberdayakan. Untuk itu pemerintah melalui instansi terkait, memfasilitasi proses-proses pemberdayaan melalui berbagai program kemasyarakatan, pembinaan dan pemberian bantuan untuk menggairahkan pembangunan desa serta pemberian pelatihan keterampilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah kebijakan pembangunan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Salah satunya adalah program Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat (Gapura) Saijaan. Program Gapura Sa-ijaan

ini, seperti halnya dengan program lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat seperti Program PNPM-PPIP, PNPM-P2KP dan Pamsimas ataupun Program dari Pemerintah Propinsi yakni Gerbangmas Taskin, merupakan program yang didesain dalam rangka melaksanakan pencapaian visi dan misi Bupati Kotabaru meningkatkan infrastruktur di perdesaan. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 program Gapura Saijaan juga diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya merupakan Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Desa dicantumkan dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Alokasi bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang disalurkan pada setiap Desa dalam Program Gapura Saijaan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 03 Tahun 2013 tentang Program Gerakan Pembangunan Rakyat Sa-ijaan melalui Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per Desa dan ditambah dana reward kepada desa pelaksana terbaik 1 dan 2 di setiap kecamatan. Jumlah Dana keseluruhan untuk 201 Desa yang ada di Kabupaten Kotabaru, telah dialokasikan sebesar Rp. 14.910.000.000,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dalam rangka kegiatan ini mengalami berbagai kendala diantaranya kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik dan adanya perusahaan perkebunan di Kawasan Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu yang berbatasan dengan desa sungai Kupang Jaya sehingga menyebabkan asas kegotongroyongan menjadi luntur dan partisipasi masyarakatnya menurun karena oleh kesibukan bekerja di kebun perusahaan. Terdapat tanggapan yang sangat variatif dari masyarakat dalam merespon program ini

karena efektivitasnya yang dipertanyakan karena di Desa Sungai Kupang dalam implementasi Gapura Saijaan ini, perencanaan kegiatan yang mana yang dibiayai dari dana Gapura Sa-ijaan ini tidak jelas, yang akhirnya bisa saja satu kegiatan dilaporkan penggunaan dananya di dua atau lebih sumber, misalkan laporan kegiatan penggunaan dana PNPM-PPIP, PNPM-P2KP ataupun Dana Alokasi Desa (DAD). Karena itu dengan adanya permasalahan pada implementasi kegiatan Gapura Saijaan ini, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi program Gapura Saijaan ini di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini, yakni : Bagaimana proses implementasi program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan? Faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan?

3. Tinjauan Pustaka Pengertian Kebijakan

Friedrick (dalam Islamy, 2004:17) pengertian kebijakan adalah “... *a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*” (“... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).

Ada beberapa elemen dalam implementasi kebijakan. Menurut Lineberry (1978:70-71) elemen-elemen tersebut terdiri dari :

1. Pengangkatan dan mempekerjakan suatu agen baru untuk melaksanakan suatu

kebijakan baru, atau pengujian tanggung jawab pelaksanaan pada agen yang telah ada personilnya.

2. Penerjemahan maksud-maksud dan tujuan-tujuan legeslatif kedalam aturan-aturan operasional yang terbaik; pembuatan petunjuk-petunjuk pelaksanaan untuk digunakan oleh pelaksana/implementor.
3. Koordinasi sumber daya agen dan ekspenditur kepada target group; pengembangan tanggung jawab dari bagian-bagian dalam agen dan antara agen dengan agen yang terkait.
4. Pengalokasian/penempatan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan atau mengatasi dampak kebijakan).

Kegagalan kebijaksanaan oleh Hagwood dan Gun (Wahab : 1997:62) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failer*) menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. *Non implementation*, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. *Unsuccesfull Implementation*, manakala suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi mengingat eksternal ternyata tidak menguntungkan atau tidak berhasil dalam mewujudkan dampak/hasil akhir yang diinginkan.

Implementasi itu sendiri memiliki unsur sebagai berikut:

1. Proses implementasi program kebijakan adalah : rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional.
2. Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali..
3. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang mutlak, yaitu (a) adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. (b) target group, yaitu sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan akan menerima program tersebut, perubahan atau peningkatan. (c) unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan

maupun pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

4. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III dalam Winarno (2006:127) sebagai berikut :

1. Struktur Birokrasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau sikap
4. Komunikasi

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya penomena.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat diperlukan bagi penelitian kualitatif ini diperlukan informan kunci pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Sungai Kupang Jaya.
2. Ketua LPM Desa Sungai Kupang Jaya.
3. Ketua BPD Desa Sungai Kupang Jaya.
4. Camat Kelumpang Selatan.
5. Kabid UEM Badan pemberdayaan dan Pemerintahan Desa
6. Para Ketua RT di Desa Sungai Kupang Jaya
7. Masyarakat desa Sungai Kupang Jaya

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, selain itu perlu juga dijelaskan alat bantu apa yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini alat bantu pengumpulan data adalah fotografi, dokumen, dan perekam suara.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara.

2. Studi kepustakaan
3. Dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992:15-20), terdiri atas 3 komponen analisis, yaitu :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data atau Display Data
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Ketergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*confirmability*)

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dalam penyusunan rencana program Gapura Saijaan, pemerintah Desa Sungai Kupang Jaya, mengikuti prosedur perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang masih berlaku, terutama sekali peraturan yang berkaitan langsung dengan prosedur pelaksanaan kegiatan program Gapura Saijaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Sosialisasi program Gapura Saijaan dilakukan secara formal dan non formal, secara formal telah dilaksanakan pada setiap kecamatan dengan mengikutsertakan seluruh Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) beserta Bendahara LPM selaku pelaksana kegiatan, sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Kabupaten. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara non formal, dimana pada setiap ada kegiatan kunjungan Bupati Kotabaru ke Desa.

Program Gapura Saijaan adalah program Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dialokasikan khusus kepada pemerintahan desa/Kelurahan sebagai dana stimulan dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos Belanja Tidak Langsung yakni Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan selanjutnya dicantumkan dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes)

Sungai Kupang Jaya.

Mekanisme pelaksanaan di Tingkat RT, Desa dan tingkat Kecamatan berdasarkan Petunjuk Teknis. Penyusunan Rencana dari kegiatan Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan, dilakukan secara berjenjang. Pertama-tama setiap ketua RT melakukan musyawarah pada tingkat RT, yang kemudian hasil musyawarah tersebut dibuat secara tertulis untuk selanjutnya akan dibawa pada musyawarah tingkat Desa sebagai rencana kegiatan dari masyarakat RT yang bersangkutan. Setelah seluruh RT melakukan musyawarah dan menghasilkan perencanaan pada tingkat RT.

Pada Tingkat Desa, setelah hasil musyawarah RT dikumpulkan kemudian diserahkan kepada PPTKD Desa Sungai Kupang Jaya, selanjutnya diadakan Musyawarah Desa Tahap I. Forum ini dilaksanakan untuk membahas, menentukan dan menyepakati pemilihan TPD dan TTD. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musdes tahap I yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2012 sangatlah kurang, hal ini dapat dilihat pada daftar hadir yang diedarkan dan hanya ada 45 orang yang berhadir dari total undangan yang disebar sebanyak 150 lembar. Hasil Berita Acara Musdes I maka dipilih Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa dan Tenaga Tekhnis Desa (TTD) dan kemudian di bentuklah 2 (dua) kelompok Masyarakat (POKMAS) yakni Pokmas Jaya Lestari terdiri dari warga masyarakat RT.01,02,03,04,05,12 dan Pokmas Maju Bersama terdiri dari Warga Masyarakat RT.06,07,08,09,10,11,13.

Partisipasi masyarakat dalam Musdes tahap ke II mengalami peningkatan jika dibandingkan pada Musdes tahap I yaitu bertambah 20 orang menjadi 65 orang dari jumlah 150 undangan yang diedarkan. Pada Musdes II pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012, menghasilkan keputusan dan menetapkan proyek Pengerasan Jalan menuju kebun dijadikan prioritas kegiatan program Gapura Saijaan pada tahun 2013.

Saat disepakati dibuat Berita Acara kesepakatan dan DURK yang disampaikan dan ditandatangani oleh Ketua LPM oleh Pemerintah Desa melalui Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan Desa (PPTKD) dalam hal ini Kaur Pembangunan, disusunlah Rencana Kerja Kegiatan (RKA) kemudian dianggarkan dalam RAPBDes untuk disampaikan dan evaluasi oleh Tim Kabupaten. Selanjutnya menjadi APBDes setelah ditetapkan Perdes oleh Kepala Desa.

RAPBDes oleh pemerintah desa Sungai Kupang Jaya diajukan dan dibahas pada rapat anggaran desa pada BPD, kemudian diberikan pengarahannya dan didampingi oleh pihak Kecamatan Selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kotabaru c.q. Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMD) untuk selanjutnya di evaluasi oleh tim evaluasi APBDes.

Penyaluran Gapura Saijaan dilakukan dalam satu tahapan sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), karena program Gapura Saijaan merupakan bagian dari struktur APBDes, maka terlebih dahulu Kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes. Pencairan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu LPM mengajukan pencairan kepada PPTKD yang selanjutnya oleh BUDes mengajukan usulan pencairan kepada BPMD, kemudian diteruskan kepada BPKAD melalui dana transfer langsung ke rekening BUDes.

Pelaksanaan Proyek dilakukan dengan bergotong-royong dan diwakili oleh setiap warga RT dengan di Ketua oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Bersama, dengan jumlah masyarakat yang melakukan kerja gotong-royong sebanyak 40 orang, sedangkan yang lainnya banyak berhalangan dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah karena mereka adalah kebanyakan buruh sawit di perusahaan Sawit. Diantara mereka ada yang menyumbangkan tenaga, ada yang menyumbangkan material, lahan pekarangan dengan merelakan tanah mereka terkena pelebaran jalan termasuk bagaimana warga desa Sungai Kupang Jaya memelihara hasil proyek dari program Gapura Saijaan.

Secara umum kegiatan program Dana Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Swadaya Masyarakat di Desa Sungai Kupang Jaya berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, yakni dengan diserahkannya Surat Pertanggung Jawaban

oleh Ketua LPM kepada Kepala Desa Sungai Kupang Jaya. Setelah itu Kepala Desa Sungai Kupang Jaya melakukan analisa kegiatan bersama dengan BPD Desa Sungai Kupang Jaya, secara umum tidak ditemui pelanggaran-pelanggaran teknis pertanggung jawaban yang dibuat LPM tersebut.

Pembahasan

Dari temuan dan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kesiapsediaan masyarakat untuk berpartisipasi sangat tergantung pada terakomodir tidaknya kepentingan-kepentingan dan aspirasi mereka dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dari hasil wawancara tersebut juga bisa digaris bawahi bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan ini, dapat dikategorikan dalam 4 (empat) bentuk, yakni : 1) Tenaga Kerja 2) Ganti Rugi 3) Material dan 4) Pemeliharaan.

Pelaksanaan Program Gapura Saijaan di desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan ini, terlihat perpaduan mekanisme *top down* dan *bottom up* yang dilaksanakan secara terintegrasi.

Tingkat ketergantungan pemerintah desa Sungai Kupang Jaya terhadap Gapura Saijaan masih sangat tinggi, maka keadaan seperti tersebut sama sekali tidak menguntungkan dalam mewujudkan kemandirian organisasi desa. Hal ini diperparah lagi dengan kurang berinisiatifnya pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli desanya.

Sementara itu dengan sistem yang dipakai dalam pengelolaan Gapura Saijaan ini, akibat yang dapat dilihat berikutnya adalah pemberdayaan yang ditempuh cenderung akan mengalami stagnan, dimana wujud partisipasi yang diangkat melalui peranannya masyarakat dalam bergotong-royong dan dianggap sebagai swadaya murni masyarakat hanya bersifat sementara adanya kegiatan program. Oleh karena itu Pelaksanaan program Gapura Saijaan adalah program yang diharapkan bertumpu pada masyarakat, pola pendekatan yang dominan adalah *bottom up* dimana pemerintah hanya bersifat fasilitasi, sehingga dalam pelaksanaan program di desa pendamping

tersebut akan lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dapat digunakan teori George Edwards III dalam Winarno (2002 : 125) yang menyebutkan ada 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yakni:

1. Komunikasi

komunikasi menurut Edwards membahas menjadi tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

Transmisi, bagaimana melihat dari sosialisasi dalam kegiatan pada Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru yang masih belum baik karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui detail program ini sehingga banyak pertanyaan dan keraguan dalam tiap kegiatannya.

Konsistensi, Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru jelas memiliki konsistensi dan jatah yang jelas karena tiap desa diberikan jatah yang sama yakni Rp. 70.000.000,00.

Kejelasan (clarity), Pelaksanaan Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan sudah sesuai petunjuk tentang teknis baik persyaratan, proses, maupun biaya sudah tertuang dalam pedoman yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mungkin yang kurang hanya lah penerapan yang seharusnya dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah desa, agar warga desa dapat dengan jelas urgensinya.

2. Sumber-Sumber

Adapun sumber yang penting dalam a) staff; b) wewenang dan c) fasilitas.

3. Kecenderungan

Kecenderungan yang ada dalam implementasi Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru antara lain adanya perencanaan

pembangunan yang dalam tingkat urgensinya masih rendah dan berdasarkan atas keinginan, bukan berdasarkan atas kebutuhan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru belum memiliki SOP namun bentuk pedoman pelaksanaan sudah ada.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap dampak pelaksanaan Program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya ini, penelitian difokuskan kepada dua aspek, yakni melihat dari aspek perekonomian dan dari aspek sosial budaya masyarakat, yaitu :

Aspek ekonomi, dampak positif yang nampak dari program ini antara lain dengan dilakukannya perbaikan jalan-jalan ke kebun yang akan berakibat lebih lancarnya proses keluar masuk barang hasil kebun atau pertanian dan akan lebih cepat sampai kedesa untuk kemudian diolah dan dipasarkan di Pasar Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan maupun di Pasar Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir.

Aspek Sosial dan Budaya, dampak positif terhadap tingkat perkembangan kegotongroyongan masyarakat, terutama dilihat dari antusiasme masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti dalam pelaksanaan proyek

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : Bahwa partisipasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik pada kebijakan yang bersifat terprogram dan terus menerus dilakukan, memiliki responsifitas yang tinggi atas keinginan masyarakat dengan mengoptimalkan pola pendekatan *Bottom Up*, serta memantapkan peran seluruh stakeholder dan memaksimalkan sosialisasi serta sistem evaluasi.

6. Kesimpulan

Program Gapura dapat menumbuhkan kembangkan partisipasi aktif masyarakat,

terutama sikap kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program Gapura Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya, relatif sudah cukup baik, dan masih kurang memperhatikan aspek pelibatan masyarakat secara keseluruhan dalam setiap tahapan kegiatan.

Disarankan perlunya program bantuan desa dalam bentuk stimulan dengan fokus peningkatan perekonomian masyarakat desa seperti pendirian KUT. Perlu adanya *Technical Assistantcy* bagi aparat desa untuk melatih mereka dalam membenahan sistem pemerintahan desa dan penanganan pembangunan di pedesaan, serta pengadministrasian dokumen di pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____ 1998. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya*, FIA UNIBRAW, IKIP, Malang.
- Abe, Alexander, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Holt Rinehart and Winston.
- Bryant, Corralie, Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Cohen, John dan Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design*, Development Monograf number 2. Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.
- Darudono, Dodot, 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pendukung Pembangunan Desa (Sustu Studi di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)*, Unibraw Malang.
- Dunn, William, N, 2000. *Public Policy Analysis: An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Dusseldorp, D.B.W.M. and J.M. Van Staveren. 1980. *Framework for Regional Planning in Developing Countries*. Netherlands: International Institute for Land Reclamation and Improvement.
- Dye, Thomas, R, 1972, *Understanding Public Policy*, Prentice hall, Inc, Englewood Cliffs, New jersey.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.
- Grindle Merilee S. dan. Thomas. John W 1991. *Public Choices and Policy Change*. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London
- Goulet, Denis. 1989, *Participation in Development : New Avenue*, World Development, Vol. 17 No. 2.
- Hoessein, Benyamin. 1998. *Otonomi dan Pemerintaban Daerah: Tinjauan Teoritik, dalam R. Siti Zubro: Pemerintaban Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, PPW-LIPI, Jakarta.
- Huntington, Samuel, P. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- _____ 2004. *Membangun Masyarakat Partisipatif*. Dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.
- Jenkins, W.I., 1978. *Policy Analysis*, Martin Robertson, Oxford.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertimbangan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Korten. D.C& Sjahrir, 1987. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, yayasan obor Indonesia.
- Lineberry, Robert L. 1978. *American Public Policy*, Harpen Z. Row, New York.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 1987. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Moekijat. 1993. *Teori Komunikasi*, Mandar Maju. Bandung
- Mubyarto, 1996, *Membina Ilmu Ekonomi Pertanian*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta.
- Muluk, Khairul, M.R, 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing Malang.
- Nasution Zulkarimen, 2004. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nogroho Iwan & Rochmin Dahuri. 2003, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES Jakarta.
- Peter Hagul, 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Yayasan Dian Desa Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1988. *Mulai Berguru Dari Rakyat*, dalam Robert Chambers : *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Terjemahan Pepep Sudradjat, LP3ES, Jakarta.
- Riggs, F.W. 1988. *Administrasi Negara Berkembang, Teori Masyarakat Prismatic*, Terjemahan Yasogama, Radjawali, Jakarta.
- Setyodarmodjo, Soenarko H. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan*. Airlangga University Press, Jakarta.
- Siedentopf, Heinrich, 1989. *Decentralization for Roral Development: Government Approaches and People's Initiative in Asia The Pacific, Planning and Administration Asia and Pacific Special IULA*, Vol. 16 Number 2.
- Sjahrir & Korten. D.C 1987, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Surjadi, Drs, M.A, Ph.D. 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya, 1980, *Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agusng Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.